

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.LandasanTeori

2.1.1. LaporanKeuangan

2.1.1.1.PengertianLaporanKeuangan

Menurut SAK PadaKerangkaDasarPenyusunan Dan PenyajianLaporanKeuanagan(2012)Laporankeuanganmerupakanbagiandari proses pelaporankeuangan.Pelaporan keuangan berisi tentang informasi mengenai keadaan perusahaan yang bersifat non keuangan. SedangkanSAK Pada No.1 (2012) menerangkan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2002). Sedangkan menurut Harahap (2002), laporan keuangan berisi tentang semua aktivitas perusahaan yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainnya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan dan untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan.

Menurut Djarwanto (2001) laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil refleksi dari sekian banyak transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang bersifat finansial dicatat, digolong-golongkan, dan diringkaskan dengan cara setepat-tepatnya dalam satuan uang dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan.

2.1.1.2. Tujuan Laporan Keuangan

SAK No.1 (2012) menerangkan tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut Hanafi (2000), menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditur, dan pemakai lainnya mengenai potensial perusahaan saat ini mau

pun yang akan datang untuk pembuatan keputusan investasi, pemberian kredit dan investasi semacam lainnya.

2. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemakai eksternal untuk memperkirakan jumlah waktu (*timing*), dan ketidakpastian dalam penerimaan kas.
3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditur, dan pemakai lainnya untuk memperkirakan jumlah waktu dalam penerimaan bunga dan dividen.

2.1.1.3. Pemakai Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (2012), dinyatakan bahwa pengguna laporan keuangan meliputi:

1. Investor

Investor atau penanam modal memiliki kekhawatiran yang tinggi terhadap risiko serta pengembalian dari investasi yang dilakukannya. Investor ingin mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, dan perbandingannya dengan perusahaan sejenis lainnya. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menanam, atau menjual investasi tersebut.

Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang

memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar deviden.

2. Karyawan

Karyawan tertarik pada informasi profitabilitas perusahaan yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan, guna mengetahui apakah karyawan masih bisa bekerja di perusahaan dalam jangka waktu yang lama atau tidak.

Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan paskakerja, dan kesempatan kerja.

3. Pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah perusahaan dapat membayar pinjaman serta bunganya pada saat jatuh tempo.

4. Pemasok dan kreditur usahalainnya

Pemasok dan kreditur usahalainnya tertarik dengan informasi keuangan yang

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.

Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali karena sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

5. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama karena mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang, atau bergantung pada perusahaan.

6. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga lainnya berkepentingan dengan pengalokasian sumber daya yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan.

Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

7. Masyarakat

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*tren*) dan

perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

2.1.2. Teori Agensi

Hal penting dalam teori agensi adalah kewenangan yang diberikan kepada agen untuk melakukan suatu tindakan dalam hal kepentingan pemilik. Teori agensi menghasilkan cara yang penting untuk menjelaskan kepentingan yang berlawanan antara manajer dengan pemilik yang merupakan suatu rintangan (Raharjo, 2007).

Teori keagenan dapat dipandang sebagai model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut *agent* dan pihak yang lain disebut *principal*. *Principal* mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada *agent*, hal ini dapat pula dikatakan bahwa *principal* memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggung jawab *agent* maupun *principal* diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama (Yushita, 2010).

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Jensen dan Meckling (1976 dalam Jao dan Pagalung, 2011), menyatakan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian

mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Prinsipal adalah pemegang saham atau investor, sedangkan agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan atau manajer. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor dan pengendalian di pihak manajemen.

2.1.3. Manajemen Laba

Sulistyanto dan Wibisono (2008) menyatakan bahwa manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau memperbarui informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mempengaruhi kinerja dan kondisi perusahaan.

Manajemen laba merupakan setiap tindakan manajemen yang dapat mempengaruhi angka laba yang dilaporkan. I Guna dan Herawaty (2010) menyatakan manajemen laba sebagai campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri (manajer).

Manajemen laba sebagai *disclosure management* dalam pengertian manajemen melakukan suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi (Schipper, 1989 dalam Barus dan Setiawati 2015).

Menurut Sulistyanto (2008) ada beberapa alasan manajer melakukan manajemen laba:

1. Motivasi Bonus

Bonus plan hypothesis menegaskan bahwa *ceteris paribus*, manajer perusahaan cenderung untuk memilih prosedur-prosedur akuntansi yang menggeser *earnings* yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode sekarang. Manajer melakukan manajemen laba untuk kepentingan bonusnya.

2. Motivasi Kontraktual Lainnya

Hipotesis *debt/equity*, suatu perusahaan yang rasio *debt/equity* besar cenderung manajer perusahaan memilih prosedur-prosedur akuntansi yang menggeser *earning* yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode sekarang. Manajemen melakukan manajemen laba untuk memenuhi perjanjian perjanjian utanganya agar meloloskan perusahaan dari kesulitan keuangan.

3. Motivasi Politik

Perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodiknyadi banding perusahaan yang kecil. Hal

ini dilakukan untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah.

4. Motivasi Pajak

Manajer termotivasi melakukan manajemen laba karena income taxation.

Karena semakin tinggi labanya maka semakin besar pajak yang dikenakan.

Sehingga manajer melakukan manajemen laba untuk mengurangi pajak tersebut.

5. Pergantian CEO (*Chief Executive Officer*)

Motivasi manajemen laba ada di sekitar pergantian CEO.

Hipotesis rencana bonus menjelaskan bahwa CEO yang akan diganti melakukan pendekatan strategi untuk memaksimalkan laba agar menaikkan bonusnya.

6. Motivasi Pasar Modal

Motivasi ini muncul karena informasi akuntansi digunakan secara luas oleh investor dan para analis keuangan untuk menilai saham. Dengan begitu, kondisi ini menciptakan kesempatan bagi manajer untuk memanipulasi *earnings* dengan cara mempengaruhi performa harga saham jangka pendek (Sanjaya, 2008).

Manajemen laba dapat diukur menggunakan *Modified Jones Model* dengan langkah-langkah sebagai berikut (Ujiyantho dan Pramuka, 2007)

Mengukur total akrual.

$$TAC = NI - CFO$$

Menghitung nilai *accruals* yang diestimasi dengan persamaan regresi.

$$TAC_t / A_{t-1} = \alpha_1 (1 / A_{t-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_t / A_{t-1}) + \alpha_3 (PPE_t / A_{t-1}) + e$$

Menghitung *non discretionary accruals*

$$(NDA) NDA_t = \alpha_1 (1 / A_{t-1}) + \alpha_2 ((\Delta REV_t - \Delta REC_t) / A_{t-1}) + \alpha_3 (PPE_t / A_{t-1})$$

Menghitung *discretionary accruals*

$$DA_t = TAC_t / A_{t-1} - NDA_t$$

Keterangan :

TAC : total akrual (*total accruals*)

NI : laba bersih operasi (*net income*)

CFO : aliran kas dari aktivitas operasi (*cash flow from operation*)

A_{t-1} : total aset untuk sampel perusahaan i pada akhirtahun t-1

ΔREV_t : perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ketahun t

ΔREC_t : perubahan piutang perusahaan i dari tahun t
1 ke tahun t

PPE_t : aktiva tetap (*property, plant and equipment*)
perusahaan tahun t

NDA_t : *non discretionary accruals* pada tahun t

DA_t : *discretionary accruals* perusahaan i pada
periode t

α : *fitted coefficient* yang diperoleh dari hasil
regresi pada perhitungan *total accruals*

Variabel Independen

Selain menggunakan *modified jones model*,
manajemen labajugabisadiukur dengan menggunakan
rumus sebagai berikut (Utami, 2005):

<small>Manajemen Laba (ML) = $\frac{\text{Perubahan Laba}}{\text{Periode (t)}}$</small> <small>Akrual Modal Kerja (t)</small> AkruaI Modal Kerja t = AL - H - kas
Keterangan :
<small>AL = Perubahan aktiva lancar pada periode t H = Perubahan utang lancar pada periode t</small> <small>kas = Perubahan kas dan ekuivalen kas pada periode t</small>

Data akruaI modal

kerjadapatdiperolehlangsungdarilaporanaruskasaktivitasoperasi,

sehingga investor dapat langsung memperoleh data tersebut dan melakukan perhitungan yang rumit.

2.1.4. *Good Corporate Governance*

Sulistiyanto dan Wibisono (2008) mengemukakan bahwa *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi setiap *stakeholder*. Ada saham atau investor untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Corporate governance merupakan suatu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksinya, para pemegang sahamnya dan *stakeholders* lainnya (OECD, 1999).

Corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta peran pemegang kepentingan intern atau ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Boediono, 2005).

Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG (2006) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip pokok *Good Corporate Governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah :

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi) Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
2. *Accountability* (Akuntabilitas) Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban) Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.
4. *Independency* (Independensi) Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. *Fairness* (Kesetaraan dan kewajaran) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan

2.1.5. Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh. Jensen dan Meckling (1976 dalam Ujiyanthodan Pramuka 2007), menyatakan bahwa kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen dapat menyetarakan kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajer sehingga konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer dapat dikurangi. Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan.

Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba.

Dalam penelitian ini kepemilikan manajerial dihitung menggunakan rumus (Sari dan Asyik, 2013):

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen}}{\text{Total modal saham perusahaan yang beredar}} \times 100\%$$

Keterangan:

Km = Kepemilikan Manajerial

Jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen = Seluruh jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dalam perusahaan pada periode t

Total modal saham perusahaan yang beredar = Seluruh total modal saham yang dimiliki oleh perusahaan pada periode t

2.1.6. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara

efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005).Jao dan Pagalung (2011)menyatakankepemilikaninstitusionaladalahjumlahpersentasehak suara yang dimilikiolehinstitusi. Kepemilikaninstitusionaldiukurdenganpersentasejumlahsaham yang dimilikiolehinstitusiterhadapseluruh modal sahamperusahaan.

Cornett et al. (2006 dalam Fauziyah, 2014), menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan investor institusional dapat membatasi perilaku manajer. Dengan demikian, keberadaan investor institusional dapat mendorong manajer untuk mendorong perhatiannya terhadap kinerja perusahaan, sehingga investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Dalam penelitian ini kepemilikan institusional dihitung menggunakan rumus (Sari dan Asyik, 2013):

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki investor institusi}}{\text{Total modal saham perusahaan yang beredar}} \times 100\%$$

--

Keterangan:

KI = Kepemilikan Institusional

Jumlah saham yang dimiliki investor institusi = Seluruh jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi pada periode t

Total modal saham perusahaan yang beredar = Seluruh total modal saham yang dimiliki oleh perusahaan pada periode t

2.1.7. Ukuran dewan komisaris

Dewan komisaris berfungsi untuk melakukan pengawasan. Dewan komisaris dipilih oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mewakili kepentingan para pemegang saham tersebut. Peran komisaris sangat penting dan cukup menentukan bagi keberhasilan implementasi *good corporate governance*. Diperlukan komitmen penuh dari komisaris agar implementasi *good corporate governance* dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Selain itu dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan baik mengenai BUMN maupun usaha BUMN dan memberikan nasihat kepada direksi (Sari dan Asyik, 2013).

Ukuran dewan komisaris mempengaruhi praktik manajemen laba pada perusahaan. Nasution dan Setyawan (2007) menemukan

pengaruh positif signifikan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan perbankan. Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka semakin besar pula manajemen laba yang dilakukan perusahaan (Kristiani, Sulindawati dan Herawati, 2014).

Dalam penelitian ini ukuran dewan komisaris dihitung menggunakan rumus (Sari dan Asyik, 2013):

$$DK = \text{Jumlah keberadaan dewan komisaris dalam perusahaan } i \text{ pada tahun } t$$

Keterangan:

DK = Dewan Komisaris

2.1.8. Komposisi dewan komisaris independen

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Namun, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris Utama adalah setara.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Dalam penelitian ini komposisi dewan komisaris independen di hit

ung menggunakan rumus (Sari dan Asyik, 2013):

$$\text{KOMIN} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris dari luar perusahaan}}{\text{Total anggota dewan komisaris perusahaan}}$$

Keterangan:

KOMIN = Komposisi dewan komisaris independen

Jumlah anggota komisaris dari luar perusahaan =

Seluruh jumlah anggota komisaris dari luar perusahaan pada periode t

Total anggota dewan komisaris perusahaan =

Seluruh jumlah anggota dewan komisaris perusahaan pada periode t

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis menggunakan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian pada penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal dan skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS	VARIABEL	HASIL
1	Mahariana dan Ramantha, (2014)	1. Variabel Dependen: Manajemen Laba 2. Variabel Independen: a) Kepemilikan manajerial b) Kepelmilikan institutional	1. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif pada manajemen laba. 2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada manajemen laba.
2	Sari dan Asyik, (2013)	1. Variabel Dependen: Manajemen Laba 2. Variabel Independen: a) <i>Leverage</i> b) Kepemilikan Institutional c) Kepemilikan Manajerial d) Dewan Komisaris	1. <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 2. terhadap manajemen laba. 3. Kepemilikan Institutional berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 4. Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 5. Dewan Komisaris berpengaruh negatif

		<ul style="list-style-type: none"> e) Komisaris independen f) Komite audit 	<p>terhadap manajemen laba.</p> <ul style="list-style-type: none"> 6. Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 7. Komite Audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
3	Rahmawati, (2013)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Variabel Dependen: Manajemen Laba 2. Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> a) Dewan komisaris independen b) Komite audit independen c) Kepemilikan manajerial 	<p>Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara parsial hanya dewan komisaris independen yang berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sementara komite audit independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.</p>
4	Jao dan Pagalung, (2011)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Variabel Dependen: Manajemen Laba 2. Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> a) Kepemilikan manajerial b) Kepemilikan institusional c) Ukuran dewan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan corporate governance melalui kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris independen, dan jumlah pertemuan komite audit mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Di sisi lain

		<p>komisaris</p> <p>d) Komposisi dewan komisaris independen</p> <p>e) Komite audit</p> <p>f) Ukuran perusahaan</p> <p>g) <i>Leverage</i></p>	<p>kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.</p> <p>2. Ukuran perusahaan mempunyai hubungan negatif signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.</p> <p>3. <i>Leverage</i> tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.</p>
5	Fauziah, (2014)	<p>1. Variabel Dependen: Manajemen Laba</p> <p>2. Variabel Independen:</p> <p>a) Kepemilikan institusional</p> <p>b) Kepemilikan manajerial</p> <p>c) Dewan komisaris independen</p> <p>d) <i>Leverage</i></p>	<p>1. GCG dengan proksi kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba</p> <p>2. GCG dengan proksi kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba</p> <p>3. GCG dengan proksi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan</p>

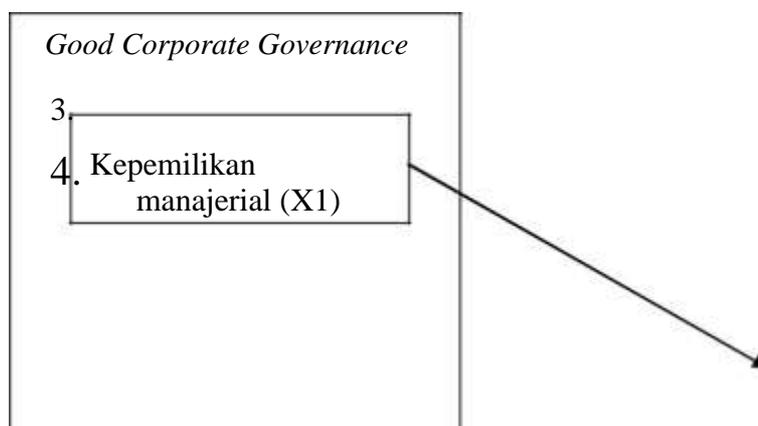
			<p>tidak signifikan terhadap manajemen laba</p> <p>4. <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba</p> <p>5. GCG dengan proksi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba</p>
--	--	--	---

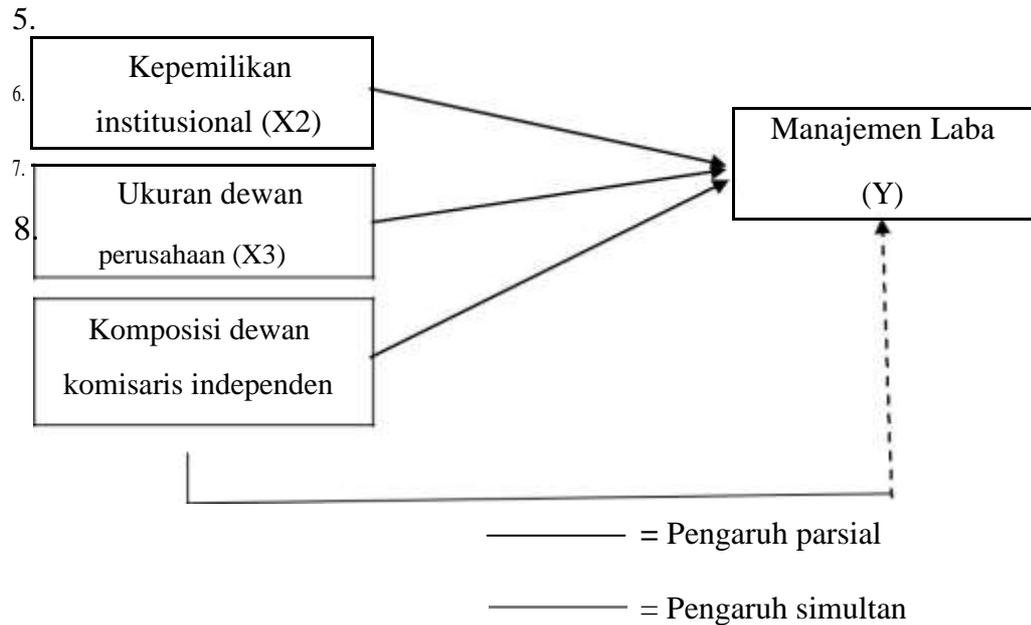
2.3.Kerangka Pemikiran

Agency theory memberikan gambaran bahwa masalah manajemen laba dapat diminimalisir dengan pengawasan *melalui good corporate governance*. *Corporate governance* merupakan suatu konsep untuk meningkatkan kinerja manajemen dalam supervise atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap shareholder dengan mendasarkan pada kerangka perturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Apabila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengantransparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak (Nasution dan Setiawan, 2007).

Sari dan Asyik (2013) menyatakan kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian dari variabel lain menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba (Sumanto dan Asrori, 2014). Sedangkan variabel proporsi dewan komisaris independen terbukti berpengaruh negatif terhadap manajemen laba (Nabila dan Daljono, 2013).

Berdasarkan uraian tersebut, atas dasar teori atau penelitian terdahulu, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4.Hipotesis

2.4.1. Kepemilikan manajerial

Kristiani, Sulindawati dan Herawati (2014) menyatakan kepemilikan manajerial dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan manajer. Jika manajer mempunyai kepemilikan pada perusahaan maka manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajer juga mempunyai kepentingan di dalamnya. Faisal (2004) menyatakan bahwa besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan (*congruance*) kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Hasil penelitian Jao dan Pagalung (2011) menyatakan adanya pengaruh negatif signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap manajemen

laba. Mahariana dan Ramantha (2014) menyatakan Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif pada manajemen laba. Dari penelitian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba

2.4.2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional mampu mengendalikan pihak manajemen melalui pengawasan secara efektif. Cornet et al. (2006 dalam Kristiani, Sulindawati dan Herawati, 2014) menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor insitusional dapat membatasi perilaku para manajer. Sumanto dan Asrori (2014) menyatakan variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Dari hasil penelitian tersebut, maka hipotesis penelitian:

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap manajemen laba

2.4.3. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris mempengaruhi praktik manajemen laba pada perusahaan. Nasution dan Setyawan (2007) menemukan pengaruh positif signifikan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan perbankan. Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka semakin besar pula manajemen laba

yang dilakukan perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa Ukuran dewan komisaris yang besar tidak efektif dalam mengurangi praktik manajemen laba. Dari hasil tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap praktik manajemen laba

2.4.4. Komposisi Dewan Komisaris Independen

Beasley (1996 dalam Jao dan Pagalung, 2011) meneliti hubungan antara komposisi dewan komisaris dengan kecurangan pelaporan keuangan dan menemukan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan memiliki persentase dewan komisaris eksternal yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) menyimpulkan bahwa proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan berhubungan negatif dengan manajemen laba karena anggota komisaris dari luar dapat meningkatkan tindakan pengawasan.

H4 : Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba